

Rekomendasi Kongres Koperasi Ke-3 Tahun 2017

A. Internal

1. Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi;
2. Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efisiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing;
3. Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN, Swasta dan Koperasi untuk bersama-sama memperkuat kemitraan usaha yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi;
4. Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil khususnya bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan;
5. Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulang punggung (*backbone*), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi;
6. Mendesak seluruh insan gerakan koperasi di legislatif untuk mengusulkan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk GBHN, yang sistem penyusunannya menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara;
7. Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khususnya bagi penjaminan

simpanan/tabungan anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;

B. Eksternal

8. Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk;
 - a. Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian;
 - b. Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa
 - c. Mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis;
9. Mendesak pemerintah melakukan:
 - a. Pemutihan/Penghapusan KUT;
 - b. Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), *Rice Milling Unit (RMU)* dan asset lainnya;
10. Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh perusahaan konglomerasi tertentu, kearah tata kepemilikan asset dan lahan yang berkeadilan berbasis koperasi;
11. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan alokasi anggaran pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Joko Widodo;

12. Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter kebersamaan dan kegotongroyongan serta meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melalui pendidikan formal serta Nonformal;
13. Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan luas bagi koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi nasional kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak eksklusif bagi koperasi untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga;
14. Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilan pajak bagi koperasi;
15. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga mewujudkan kedaulatan ekonomi nelayan;
16. Gerakan Koperasi Indonesia mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut, serta mengembangkan kegiatan usaha pelayaran rakyat (Koperasi Pelayaran Rakyat/Kopelra) yang digerakan koperasi sebagai bagian integral dari poros maritim dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan;
17. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan membatasi penguasaan ritel modern oleh non koperasi berdasarkan pembatasan wilayah pendirian dan mendorong kewajiban kemitraan perusahaan ritel modern non koperasi kerjasama dengan koperasi dalam rangka pemerataan dan pendapatan masyarakat